

PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS MISKIN

Tengku M. Taufik dan Chalid Sahuri

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Program Implementation Poor Rice Distribution. The purpose of this research is to know and analyze the distribution of rice to poor program implementation (*Raskin*) in Subdistrict Siak District Siak. To know us as well as the factors of success and failure of the distribution of rice to poor program implementation (*Raskin*) in Subdistrict Siak Siak Regency. This research uses the *Grindle* theory explains that the implementation of the policy dilihak of the contents of the policy and context implementation. This research was carried out in the Districts of Siak Siak Regency. Where the key informant Coordination Team *Raskin*, Coordination Team districts, Subdistricts and Coordination Team Village. Informant a complement that poor households. Where the method of determining the informant used is *purposive sampling* is the selection of informants based on predetermined research objectives. In performing the data collection method used observation and interviews to research informants. After the data are collected and then analyzed using descriptive qualitative analysis. After research found that program execution *Raskin* in Subdistrict Siak District Siak 2013 is good enough. Then the success factors in the implementation of the program *Raskin* in Subdistrict Siak District Siak 2013 is the kind of benefits obtained by the target group and the resources owned by implementing policies. Whereas the factors of failure in the implementation of the program *Raskin* in Subdistrict Siak District Siak 2013 is the regulation of legislation and policy dissemination validation recipient.

Abstrak: Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program penyaluran beras miskin (*Raskin*) di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Serta mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program penyaluran beras miskin (*Raskin*) di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan teorinya *Grindle* yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dilihak dari isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Dimana yang menjadi informan kunci yaitu Tim Koordinasi *Raskin* Kabupaten, Tim Koordinasi *Raskin* Kecamatan dan Tim Koordinasi *Raskin* Desa/Kelurahan. Informan pelengkap yaitu rumah tangga miskin. Dimana tehnik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengumpulan data digunakan metode observasi dan wawancara kepada informan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan program *Raskin* di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 2013 adalah cukup baik. Kemudian faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan program *Raskin* di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 2013 adalah jenis manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran dan sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Sedangkan faktor-faktor kegagalan dalam pelaksanaan program *Raskin* di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 2013 adalah sosialisasi peraturan perundangan kebijakan dan validasi penerima.

Kata Kunci: kebijakan, implementasi kebijakan, program *raskin*

PENDAHULUAN

Program *Raskin* merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahananpangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga sasaran. Keberhasilan Program *Raskin* diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah

Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu *raskin* bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program Beras Miskin (*Raskin*) adalah program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan salah satu upaya atau program yang dibuat pemerintah guna menangan-

gulangi kemiskinan yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan. Dimana upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang pangan dan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Perberasan Serta menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 dan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Efektifitas program raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kementerian/lembaga terkait baik di pusat maupun di daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan dilandasi pemahaman bahwa raskin adalah hak orang miskin. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan program raskin memiliki kewajiban untuk menyampaikan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang telah ditetapkan BPS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang melaksanakan penyaluran program raskin diwilayahnya. Pelaksanaan program raskin yang dilakukan bertujuan untuk meringankan beban rumah tangga miskin (RTS) terhadap kebutuhan akan beras sebagai bahan pangan pokok utama yang harus dipenuhi. Oleh karenanya, aktor pelaksana program raskin dari mulai tingkat daerah, kecamatan dan desa berusaha menyusun pagu alokasi pendistribusian raskin kepada rumah tangga miskin (RTS) di Kabupaten Siak. Untuk itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelaksana program raskin adalah mengidentifikasi rumah tangga miskin (RTS) yang terdapat di

Kabupaten Siak berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan.

Berdasarkan pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak bahwa jumlah rumah tangga miskin (RTS) di Kabupaten Siak yang sudah mendapatkan pendistribusian beras miskin (RASKIN) sebanyak 7.022 KK dengan jumlah beras miskin yang sudah disalurkan 105.330 Kg. Sementara jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Siak sebanyak 13.130 KK, berarti masih ada sebanyak 6.108 KK lagi rumah tangga miskin (RTS) yang belum menerima. Kecamatan yang menerima program Raskin terbanyak ada direntang jumlah 501 KK – 2000 KK, yaitu Kecamatan Tualang sebanyak 1.869 KK, Kecamatan Minas sebanyak 945 KK, Kecamatan Sungai Apit sebanyak 743 KK, Kecamatan Kandis sebanyak 639 KK dan Kecamatan Bunga Raya sebanyak 555 KK. Kemudian kecamatan penerima program Raskin yang sedang direntang 201 KK – 500 KK, yaitu Kecamatan Koto Gasib sebanyak 426 KK, Kecamatan Kerinci Kanan 389 KK, Kecamatan Siak 292 KK, Kecamatan Lubuk Dalam sebanyak 286 KK dan Kecamatan Dayun sebanyak 240 KK. Selanjutnya kecamatan penerima program Raskin yang terkecil direntang 1 KK – 200 KK, yaitu Kecamatan Pusako sebanyak 200 KK, Kecamatan Mempura sebanyak 200 KK, Kecamatan Sabak Auh sebanyak 184 KK dan Kecamatan Sungai Mandau sebanyak 75 KK.

Berdasarkan informasi data tersebut, alasan memilih lokus kajian di Kecamatan Siak disebabkan oleh Kecamatan Siak terletak pada Ibukota Kabupaten Siak yang *notabane*-nya merupakan pusat perekonomian dan perdagangan di Kabupaten Siak. Tetapi ternyata masih memiliki rumah tangga miskin yang menerima program Raskin. Padahal di Ibukota Kabupaten memiliki pilihan akan beras yang lebih baik kompetitif, namun ternyata masih ada rumah tangga miskinnya yang menerima Raskin. Apakah rumah tangga miskinnya benar-benar memanfaatkan Raskin atau malah menjual Raskinnya untuk ditukar dengan beras yang lebih baik. Fenomena inilah yang pada dasarnya sangat membutuhkan pengawasan bagi pelaksanaan penyaluran prog-

ram Raskin. Sebab dalam proses penyaluran program Raskin yang dilakukan sangat membutuhkan partisipasi *stakeholder* (LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan masyarakat) untuk mengawasi implementasinya, supaya program raskin yang disalurkan dapat diterima oleh rumah tangga miskin (RTS) yang benar-benar tepat. Sehingga penerimaan beras miskin (RASKIN) memang sangat membantu rumah tangga miskin (RTS) dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya. Oleh karenanya, pengelolaan dan pelaksanaan yang efektif dan efisien dari pengelola program raskin di tingkat desa sangat diperlukan mengingat desa adalah titik distribusi dan titik bagi dari Program Raskin.

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Meter dan Horn dalam Subarsono (2005) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan.

Pengkajian mengenai implementasi kebijakan adalah krusial bagi pengkajian administrasi publik dan kebijakan publik. Edwards III dalam Subarsono (2005) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah inti sari dan menanyakan apakah pra kondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan yang sukses? Untuk menjawab hal tersebut penting dipertimbangkan empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program penyaluran beras miskin (Raskin) di Kecamatan Siak Kabupaten Siak serta mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program penyaluran beras miskin (Raskin) di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang fenomena pelaksanaan program penyaluran beras miskin (Raskin) di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 2013. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana pelaksanaan program penyaluran beras miskin (Raskin) di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin

Pendekatan dalam implementasi program Raskin menggunakan pendekatan *top down* yang sangat umum. Dikenal dalam wacana Kebijakan Publik, padahal keputusan sering kali tidak selaras dengan materi yang diinginkan oleh masyarakat sebagai akibat dari gerak perubahan keinginan masyarakat lebih cepat dari respon aparat biokrasi terhadap perubahan itu. (Kendala administratifseringkali membuat aparat birokrasi terkesan bekerja lambat), perbedaan karakter sosial antara birokrat dengan masyarakat menyebabkan persepsi mereka berbeda terhadap satu persoalan yang sama. Sungguhpun demikian Sabatier (Subarsono, 2005) juga mengemukakan dua kelemahan lain dari pendekatan *top-down*. *Pertama*, sebuah kebijakan yang dirumuskan secara berkelanjutan walau secara jelas telah dirumuskan, menyulitkan pemerintah menguak nuansa persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat. *Kedua*, cenderung melahirkan proses kebijakan publik yang tidak demokratis, bahkan sangat mungkin melahirkan rezim politik yang otoritarian. Pem-

bahasan terhadap implementasi akan difokuskan pada isi dan lingkungan kebijakan dengan acuan teori Grindle. Masing-masing bagian ini akan dibahas berdasarkan fenomena penelitian yang diamati. Proses analisis terhadap fenomena pengamatan dilakukan dengan proses triangulasi baik dari sumber informasi maupun isi informasi.

Pelaksanaan program Raskin yang berdasarkan isi kebijakannya sudah berjalan dengan cukup baik. Walaupun di dalam pelaksanaannya sendiri masih ada hambatan dan kendala. Dimana pelaksanaan program Raskin yang berdasarkan isi kebijakan. *Pertama*, pemahaman kepentingan RTS akan Raskin pada dasarnya masih ditemukan kelemahan dalam menentukan sasaran penerima, dengan ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah dan sering tidak tepat karena mementingkan kelompok-kelompok tertentu (*subyektifitas*). Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi diantara pusat dan daerah dalam pemberian informasi dan data untuk penentuan calon penerima program Raskin. *Kedua*, manfaat Raskin yang diterima RTS pada dasarnya masyarakat miskin (RTS) sangat senang menerima bantuan Raskin dari pemerintah. Karena program ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan beras didalam kehidupan rumah tangganya. Selain itu juga program Raskin ini terasa sangat bermanfaat bagi mereka, bahkan mereka sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok berupa beras. *Ketiga*, perubahan kondisi RTS setelah menerima Raskin pada dasarnya perubahan kondisi RTS yang diinginkan hanya sekedar dalam memenuhi kebutuhan akan beras, memang sudah terjadi perubahan. Artinya tidak ada lagi masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Siak yang tidak menggunakan bahan pokok beras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. *Keempat*, ketepatan sasaran program Raskin pada dasarnya ketepatan sasaran para penerima Raskin masih belum maksimal. Karena masih banyak masyarakat miskin yang tergolong penerima Raskin masih ada yang belum terdata, sehingga kebanyakan dari masyarakat tersebut

tidak menerima Raskin yang dibagikan. Hal ini disebabkan oleh tidak validnya data masyarakat miskin yang dimiliki oleh pihak BPS. *Kelima*, kejelasan implementor tentang Raskin pada dasarnya kejelasan implementor tentang Raskin pada dasarnya sudah baik. Namun yang sering menjadi permasalahan dan yang sering muncul menyangkut pentargetan dan penyaluran program Raskin terkait dengan lemahnya sosialisasi program kepada masyarakat miskin. *Keenam*, kualitas dan kuantitas SDM sebagai implementor pada dasarnya ketersediaan SDM yang berkualitas pada tingkat pelaksanaan teknis pada dasarnya sudah tersedia, namun belum menyeluruh sampai ditingkat desa atau kelurahan. Kurang tersediannya SDM yang berkualitas ditingkat desa dan kelurahan memang disebabkan oleh kondisi SDM yang berkualitas juga terbatas.

Pelaksanaan program Raskin yang berdasarkan lingkungan implementasi sudah berjalan dengan cukup lancar. Artinya pihak implementor sudah berusaha untuk mengatasi pengaruh-pengaruh implementasi yang datangnya dari lingkungan internal dan eksternalnya. *Pertama*, kekuasaan, kepentingan dan strategi implementasi program Raskin yang mana pada dasarnya cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat berjalan dengan lancar karena sesuai dengan kondisi masyarakatnya. *Kedua*, karakteristik rezim yang berkuasa yang pada dasarnya strategi distribusi Raskin yang dilaksanakan tidak menuai protes karena kebijakan rezim yang berkuasa berdasarkan kesepakatan bersama. *Ketiga*, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran pada dasarnya tingkat kepatuhan dan responsivitas yang dimiliki oleh kelompok sasaran sudah cukup baik. Artinya pihak penerima program Raskin sudah berusaha untuk mengikuti ketentuan dan prosedur dalam penerimaan program Raskin yang diberikan oleh pemerintah. Apabila ada permasalahan yang muncul dalam penyaluran program Raskin yang dilakukan, kelompok sasaran juga berusaha untuk patuh dan membicarakan serta memusyawarahkan tentang permasalahan yang dihadapi.

Faktor-Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin

Faktor-faktor keberhasilan

Keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan sangat bergantung kepada faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi proses implementasi kebijakan itu sendiri. Jika implementor bisa memahami apa yang sebenarnya tujuan dari program yang sedang diimplementasikan maka program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Untuk melihat hal tersebut, maka implementor harus bisa melihat faktor-faktor apa sajakah yang bisa mendukung keberhasilan program.

Jenis manfaat yang diperoleh

Suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan jika dari kebijakan itu sendiri jelas memaparkan manfaat apakah yang diterima oleh kelompok sasaran dari kebijakan. Kebijakan yang mudah untuk diimplementasikan adalah kebijakan yang memberikan manfaat aktual dan bukan hanya formalitas dan simbolis saja. Dalam Kebijakan Raskin bisa terlihat jelas manfaat yang akan diterima oleh rumah tangga miskin adalah bantuan beras. Dimana bantuan ini dinilai dapat membantu keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Apalagi beras adalah kebutuhan pokok sebagai penunjang kondisi tubuh yang sehat untuk bisa, berkerja atau beraktifitas, seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima Raskin di Desa Suak Lanjut. Telah banyak ditemukan di beberapa negara berkembang masih ada terselip kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling pokok yaitu kebutuhan akan pangan atau beras.

Sumber daya yang dimiliki

Sumber daya merupakan hal yang terpenting dalam suatu kebijakan. Sebelum suatu kebijakan itu dirumuskan pembuat kebijakan harus bisa menentukan apakah kebijakan tersebut akan didukung oleh sumber daya yang memadai. Oleh karena itu sumber daya menjadi faktor penting dalam suatu kebijakan. Sumber daya sendiri terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial. Berdasarkan wawancara dengan Tim Koordinasi Kecamatan

Siak, menjelaskan bahwa untuk sumberdaya *financial* memang sedikit ada kendala karena pada saat pengambilan Raskin di gudang Perum Bulog membutuhkan biaya operasional untuk pengambilan beras sampai menuju kecamatan masing-masing, walaupun biaya operasional ini tidak terlalu besar tetapi sangat memberikan dampak bagi proses pengambilan beras Raskin dari Bulog menuju kecamatan dan dari kecamatan menuju desa/kelurahan masing-masing. Melihat kenyataan ini pihak kecamatan memberikan keringanan kepada pihak desa, yaitu dengan membantu biaya operasional pengangkutan beras Raskin sampai ke desa/kelurahan masing-masing. Selain sumber daya *financial* masih ada sumberdaya alam, yaitu beras.

Faktor-faktor kegagalan

Dalam setiap program kebijakan yang dilaksanakan pasti ada hambatan dan kendala atau faktor kegagalan yang dihadapi, karena suatu kebijakan akan sulit atau bahkan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar pasti akan ditemukan kesalahan, kekeliruan dan kurangnya respon dari pihak yang menerima program kebijakan. Melihat kenyataan yang ada maka seorang implementor sudah harus siap untuk mengatasi kemungkinan kendala yang ada. Oleh sebab itu, penting bagi seorang implementor untuk memahami isi kebijakan dan memahami tingkat kelompok sasaran yang dituju.

Sosialisasi peraturan perundangan kebijakan

Sosialisasi peraturan perundangan ini berkaitan dengan komunikasi agar masyarakat dapat mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan Raskin agar para pelaksana Kebijakan Raskin tidak lagi melakukan kesalahan, penyimpangan maupun kekeliruan yang bisa merusak proses penyaluran Raskin. Selain itu sosialisasi peraturan perundangan juga sangat penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi baik itu sosialisasi peraturan lama, sosialisasi tentang perubahan-perubahan yang dilakukan dalam proses penyaluran, maka masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga masyarakat juga bisa membantu mengawasi proses penyaluran Raskin yang sedang berjalan.

Validasi penerima

Validasi penerima Raskin ini berkaitan dengan sumber daya dalam hal ini sumber daya *financial* agar sumber daya *financial* atau anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan kebijakan Raskin sebanding dengan jumlah penerima Raskin. Artinya bahwa dengan tepatnya jumlah penerima Raskin yang terdata dan penerima tersebut tepat menurut kriteria penerima miskin, maka akan memudahkan untuk menentukan kuota beras yang akan diberikan di setiap Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Validasi penerima Raskin tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan disisi lain adanya dinamika jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, maka di setiap daerah terdapat penduduk miskin baru yang belum terdaftar sebagai penerima Raskin dan terdapat pula penerima Raskin yang meningkat taraf hidupnya sehingga tidak lagi layak untuk mendapatkan Raskin.

SIMPULAN

Pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 2013 adalah cukup baik. Hal ini disebabkan oleh sudah cukup mamunya pihak implementor dalam melaksanakan isi kebijakan yang ada dan mengatasi pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh lingkungan implementasi. Dalam pelaksanaan program Raskin yang berdasarkan isi kebijakannya sudah berjalan dengan cukup baik. Walaupun didalam pelaksanaannya sendiri masih ada hambatan dan kendala, diantaranya masih ditemukan kelemahan dalam menentukan sasaran penerima, perubahan kondisi RTS yang diinginkan hanya sekedar dalam memenuhi kebutuhan akan beras, memang sudah terjadi perubahan tetapi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat miskin masih belum terjadi dan ketepatan sasaran para penerima Raskin masih belum maksimal. Karena masih banyak masyarakat miskin yang tergolong penerima Raskin masih ada yang belum terdata, sehingga kebanyakan dari masyarakat tersebut tidak menerima Raskin yang dibagikan. Hal ini disebabkan oleh tidak validnya data masyarakat miskin yang dimiliki oleh pihak BPS. Sedangkan pelaksanaan program Raskin yang berdasarkan

lingkungan implementasi sudah berjalan dengan cukup lancar. Artinya pihak implementor sudah berusaha untuk mengatasi pengaruh-pengaruh implementasi yang datangnya dari lingkungan internal dan eksternya. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan ditemukan faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 2013 adalah jenis manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran dan sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Sedangkan faktor-faktor kegagalan dalam pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 2013 adalah sosialisasi peraturan perundangan kebijakan dan validasi penerima.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Curah
- Dunn, N William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Grindle. 1980. *Policy Content and Context in Implementation Princeton*. New Jersey: University Press
- Hassel Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elek Media Komputindo
- Ripley. 1985. *Politic Analysis in Political Science*. Chicago: Nellson Hall
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Winardi, J. 2001. *Motivasi dan Pemitivasi dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.